



PAPER – OPEN ACCESS

Kajian Refleksivitas Masyarakat Risiko dalam Pengembangan Pariwisata Siaga Bencana Berbasis Collaborative Governance

Author : Argyo Demartoto
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.586
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Kajian Refleksivitas Masyarakat Risiko dalam Pengembangan Pariwisata Siaga Bencana Berbasis *Collaborative Governance*

Risk Society Reflection Study in the Development of Collaborative Governance-Based Disaster Preparedness Tourism

Argyo Demartoto

Program Studi Sosiologi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia

Email : Argyodemartoto_fisip@staff.uns.ac.id

Abstract

Natural disaster alert and care have not been a main focus to tourism actors. Many tourist objects and destinations have been destroyed and taken material and non-material tolls due to natural disaster. This article studied the importance of collaborative governance-based disaster alert tourism development based on literature study, data and information, and related document analyzed using Beck's risk society. Tourism actors including government (Tourism Service, Social Service, Health Service, National Agency for Disaster Management, Indonesian Red Cross, Security Apparatus and etc) non-government (NGO, private, business realm, donor organization and volunteer), and society surrounding tourist objects and destinations and tourist should make coordination in preventing, alert, emergency response, social rehabilitation, and referral related to disaster. Disaster alert tourism can evolve when tourism actors (performers) as the risk society have knowledge on disaster variation and its anticipative measure; policy and guideline of disaster alert in tourist objects and destination; response and emergency response; information communication system, and disaster warning; and can mobilize resource and tourism potency existing to overcome natural disaster. Reflectivity of tourism actors as disaster risk society was accomplished by establishing disaster alert tourism team, giving education to tourism actors, providing communication and information system for natural disaster, installing warning signs and evacuation path, and taking emergency response measures by cooperating with those related.

Keywords: disaster alert tourism, tourism actor, collaborative governance;

Abstrak

Siaga dan peduli bencana alam belum menjadi hal utama pelaku wisata. Berbagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) hancur dengan menelan korban material maupun non material yang banyak karena tertimpa bencana alam. Artikel ini mengkaji pentingnya pengembangan pariwisata siaga bencana berbasis *collaborative governance* berdasarkan studi literatur, data dan informasi serta dokumen terkait yang dianalisis dengan teori masyarakat risiko dari Beck. Pelaku pariwisata baik pemerintah (Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Palang Merah Indonesia, aparat keamanan, dan lain-lain); non pemerintah (LSM, swasta, dunia usaha, lembaga donor dan relawan), serta masyarakat di sekitar ODTW dan wisatawan perlu berkoordinasi dalam pencegahan, kesiapsiagaan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi sosial dan rujukan terkait bencana. Pariwisata siaga bencana dapat berkembang bila pelaku wisata sebagai masyarakat berisiko mempunyai pengetahuan tentang variasi bencana dan antisipasinya; kebijakan dan panduan siaga bencana di ODTW; respons dan tanggap darurat; sistem komunikasi informasi dan peringatan bencana, serta mampu memobilisasi sumber daya dan potensi wisata yang ada untuk penanggulangan bencana alam. Refleksivitas pelaku wisata sebagai masyarakat berisiko bencana dilakukan dengan pembentukan tim pariwisata siaga bencana, penyuluhan kepada pelaku pariwisata, penyediaan sistem komunikasi dan informasi bencana alam,

pemasangan rambu-rambu peringatan dan jalur evakuasi, serta tindakan tanggap darurat dengan menjalin kerjasama pihak-pihak terkait..

Kata kunci: Pariwisata siaga bencana, pelaku wisata, collaborative governance;

1. Pendahuluan

Secara geologi, Indonesia berada diantara tiga lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Australia, yang terus bergerak dan bertumbukan sehingga berpotensi terjadi bencana alam. [1] [2] Dari sisi demografis, geologis, geografis, klimatologis dan hidrologis Indonesia memang berisiko terjadinya bencana. Beberapa potensi bencana alam yang mengancam, seperti banjir, tanah longsor, topan, angin puting beliung, gunung meletus, gempa bumi, badai, tsunami, tumpahan, kebocoran dan ledakan minyak atau zat kimia. [3] [4]. Hal ini berarti bencana dapat terjadi setiap saat termasuk di Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), dan apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap pembangunan pariwisata dan pencapaian target kinerja pariwisata.

Industri pariwisata Indonesia diproyeksikan menyumbang devisa sebesar AS\$ 20 miliar pada tahun 2019. Saat ini berada pada urutan ke-9 sebagai negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia, bahkan di Asia Tenggara menempati posisi terbaik di atas Thailand yang berada di nomor 12, Filipina dan Malaysia nomor 13, Singapura ke 16, dan Vietnam ke 21 [5]. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengidentifikasi 25 dari 33 provinsi di Indonesia dimana terdapat ODTW yang menarik untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara, bahkan merupakan keunggulan komparatif dan kompetitif dari pariwisata Indonesia, namun rentan bencana alam. Beberapa kejadian bencana alam, seperti erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta tahun 2010, kebakaran hutan dan lahan pada Agustus - September 2015, erupsi Gunung Agung di Bali tahun 2017, gempa Lombok yang beruntun tahun 2018, dan tsunami di Selat Sunda 22 Desember 2018 berdampak pada melemahnya industri pariwisata di Indonesia, seperti turunnya kunjungan, dan kerugian materi hingga miliaran rupiah. Tentu ini merupakan pukulan telak dan pembelajaran bagi pelaku pariwisata [6] [7].

Bencana menyebabkan berbagai ODTW rusak dan hancur, aksesibilitas terhambat, karena jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara tidak dapat dilalui dan beroperasi dengan seleyaknya; sehingga bantuan datang terlambat, pertolongan dan evakuasi korban terhambat. Akibatnya banyak korban jiwa berjatuh baik yang sakit maupun meninggal dunia, belum lagi kehilangan harta benda, rumah tinggal, fasilitas, sarana dan prasarana umum, seperti sekolah, kantor, rumah sakit dan Puskesmas, homestay, guest house, hotel, restoran, sarana rekreasi dan hiburan, dan sebagainya. Bahkan pasca bencana alam pelaku wisata merasa cemas, trauma, depresi dan takut apabila bencana terulang kembali, harus menanggung biaya mahal untuk perawatan dan pengobatan korban yang sakit, kehilangan pekerjaan dan lain-lain [8].

Kurangnya pengetahuan dan minimnya informasi tentang fenomena alam menyebabkan pelaku wisata kurang siap, tidak dapat mengantisipasi dan menghadapi bencana alam. Selain itu belum optimalnya sistem informasi pendeteksi cuaca, sehingga penanganan sebelum dan setelah bencana tidak efektif, serta koordinasi dan integrasi yang kurang komprehensif antar pelaku wisata. Selama ini penanganan bencana meskipun sifatnya responsif, namun tidak efektif mengurangi risiko bencana, karena materi kesiapsiagaan masih bervariasi tergantung pada lembaga yang memfasilitasi, sehingga pelaku wisata tetap panik ketika bencana terjadi. Pada umumnya mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri, sehingga menelan banyak korban. [9]-[12].

Pemerintah telah menetapkan kebijakan penanganan bencana yang mencakup tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, serta telah sesuai dengan Kerangka Kerja Hyogo 2005 yang menekankan upaya pengurangan risiko bencana dengan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi sebagai dalam rangka membangun ketahanan negara dan masyarakat terhadap bencana. Selain itu berkaitan dengan program pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di suatu negara. Sebagai negara rawan bencana, Indonesia sangat berkepentingan untuk melibatkan diri dalam kesepakatan dunia tersebut agar bencana termasuk di ODTW tidak terjadi kembali [13] [14]. Oleh karena, itu pelaku wisata selaku masyarakat berisiko harus reflektif atau siaga bencana. Sangat penting dan krusial bagi ODTW yang berisiko tinggi terhadap bencana untuk siap siaga melakukan antisipasi bencana. Pelaku wisata perlu mempersiapkan *framework* kesiapsiagaan sebelum, saat, dan segera sesudah terjadinya bencana dalam industri pariwisata dengan mengembangkan pariwisata siaga bencana berbasis *collaborative governance*. Artikel ini

menelaah reflektivitas masyarakat risiko dalam pengembangan pariwisata siaga bencana berbasis *collaborative governance*.

2. Bencana dan Pariwisata Ibarat Dua Sisi Mata Uang

2.1. Bencana

Bencana merupakan suatu peristiwa sebagai bagian dari fenomena alam yang dapat mengancam kehidupan manusia. Ada perbedaan antara bencana dan krisis. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam disebut bencana alam, sedangkan krisis merupakan bencana non alam dan sosial [15]. Ketidakberfungsian suatu masyarakat merupakan gangguan serius dan merugikan kehidupan manusia, baik dari segi materi, ekonomi ataupun lingkungan, dan mengatasinya menggunakan sumber daya masyarakat sendiri [16] [17].

2.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu industri yang mengelola keanekaragaman alam dan budaya sebagai daya tarik wisata. Setiap ODTW berbeda satu sama lain, sehingga jika ada kerusakan destinasi wisata, karena bencana atau krisis, maka akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan industri pariwisata. Pariwisata dan bencana memang layaknya dua sisi mata uang yang berbeda, karena saling berpengaruh satu sama lain baik positif maupun negatif. Adanya kerusakan destinasi wisata menyebabkan tidak menarik lagi sehingga turunnya jumlah wisatawan, disisi lain adanya bencana bisa menjadi komoditi pariwisata, seperti Kaliurang pasca-erupsi Gunung Merapi [18]

2.3. Risiko, Refleksivitas dan Pengurangan Risiko Bencana

2.3.1. Teori Masyarakat Berisiko

Risiko merupakan suatu konstruksi sosial sehingga dalam memahami, dan meresponsnya harus bedasar pada konteks sosial [19]. Bencana berisiko terhadap **pariwisata**. Pelaku wisata sebagai masyarakat berisiko di era postmodern mampu mengelola dan merespons risiko dan keadaan dengan kemampuannya secara mandiri sehingga risiko dapat diminimalisir atau disebut *reflexive modernization* [20] [21]. Risiko bencana ditentukan oleh *hazards* (ancaman), *vulnerability* (kerentanan), dan *risk* (risiko). Untuk mengetahui risiko bencana dirumuskan dengan **risiko = bahaya x kerentanan**. Jika biasanya risiko bencana dikhususkan pada kerentanan fisik, namun terdapat risiko lain yang dapat ditimbulkan akibat bencana, diantaranya adalah trauma, hilangnya rasa aman, dan lain sebagainya. [22] [23].

2.3.2. Refleksivitas dan Pengurangan Risiko Bencana

Risiko bencana dapat dikurangi dengan melakukan pendekatan berupa identifikasi dan evaluasi terhadap penyebab dan akibat dari bencana, baik bencana dalam bidang lingkungan, sosial maupun ekonomi. Hal tersebut mencakup bantuan kemanusiaan, sektor bantuan pembangunan, manajemen risiko, perubahan iklim dan persiapan kedaruratan. Inisiatif ini fokus pada pengurangan kemungkinan terjadinya bencana atau meningkatkan kemampuan komunitas dalam merespons kedaruratan, misalnya meningkatkan pengetahuan dan merancang kerangka kebijakan legal. Tanggung jawab dalam mengurangi risiko bencana harus dilakukan terpadu oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pembangunan termasuk pariwisata (*collaborative governance*) [24]-[26].

Kolaborasi merupakan wujud bekerja bersama dengan pihak lain dalam berbagai program atau kegiatan. Setiap individu yang melakukan kerjasama memiliki ketentuan dan syarat tertentu. Collaborative governance melakukan pengaturan pemerintahan dengan satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah termasuk masyarakat sipil untuk mengambil keputusan formal untuk merumuskan kebijakan publik dan mengelola program [27].

2.3.3. Kerangka Kerja Siap Siaga Bencana

Nick Carter menyatakan bahwa kesiapsiagaan dari suatu pemerintahan, suatu kelompok masyarakat atau individu

adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi-organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna termasuk penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil [25]. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap keadaan atau situasi saat maupun setelah terjadinya bencana. Serangkaian upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak bencana alam, seperti korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Faulkner (2001) membagi lima tahapan kerangka kerja siap siaga dan peduli bencana di ODTW atas dasar proses terbentuknya bencana, yaitu pre-event, prodromal (disaster imminent), emergency, intermediate, dan long term recovery. Kelima tahap tersebut saling berkaitan dengan unsur-unsur pengelolaan bencana, seperti pendahulu, mobilisasi, pemulihan, rekonstruksi, dan evaluasi. Tiga unsur utama yang efektif harus dimiliki siap siaga bencana, yaitu penilaian bahaya (hazard assessment), peringatan (warning) dan persiapan (preparedness) [15] [28].

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan *United Nations for Education/International Strategy for Disaster Reduction* (UNESCO/ISDR) untuk mengembangkan *framework* kesiapsiagaan masyarakat pada tahun 2006 yang terdiri dari 5 faktor kritis yang saling berkaitan yaitu Pengetahuan (P) yang berkaitan dengan fenomena alam dan kesiapsiagaan; Kebijakan, Peraturan dan Panduan (K); Rencana untuk Keadaan Darurat Bencana (ROB); Sistem Peringatan Bencana (PB); dan Mobilisasi Sumber Daya (MSD) [16] [28] [29].

3. Metode

Artikel ini menelaah karakteristik pelaku wisata sebagai masyarakat berisiko bencana, risiko bencana dan reflektivitas yang dilakukan pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata siaga bencana berbasis *collaborative governance*. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan data sekunder berupa data dan informasi terkait pengembangan pariwisata, mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana di ODTW. Hasil studi disajikan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan pengembangan pariwisata siaga bencana berbasis *collaborative governance*. Sumber pengetahuan dan pembandingan untuk mendukung studi ini adalah menyusun kompilasi dan studi pustaka [30].

4. Pariwisata Siaga Bencana Berbasis *Collaborative governance*

Bencana adalah sebuah keniscayaan, akan terjadi, bahkan kemungkinan terjadi berulang, ditambah faktor antropogenik yang kian meningkatkan bencana. Namun risiko bencana dapat dikurangi sehingga dampak bencana dapat diminimalisir dengan upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Mitigasi bencana baik struktural dan non struktural di ODTW masih sangat minim, sehingga harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan pariwisata. Hal ini dapat menjadi investasi, karena setiap 1 US\$ yang diinvestasikan untuk pengurangan risiko bencana dapat mengurangi kerugian akibat bencana sebesar 7-40 US\$. Pembangunan destinasi pariwisata, hendaknya memperhatikan peta rawan bencana, sejak perencanaan hingga pelaksanaan dikaitkan dengan ancaman bencana yang akan terjadi. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia merencanakan pembangunan 10 Bali Baru, yaitu Danau Toba, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Bromo Tengger Semeru, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Borobudur, Wakatobi, Mandalika, Morotai dan Labuan Bajo. Perencanaan pembangunan pariwisata tersebut hendaknya dikaitkan dengan mitigasi dan pengurangan risiko bencana, sehingga ODTW aman dari bencana, karena 8 dari 10 ODTW tersebut berada pada wilayah rentan gempa, dan sebagian tsunami, apalagi investasi pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas dan kawasan strategis pariwisata nasional tersebut sangat besar yaitu Rp.500 triliun [7] [31].

Kejadian bencana alam tidak dapat diketahui sebelumnya, bahkan tidak dapat mengontrol terjadinya bencana, sehingga pelaku wisata memerlukan informasi yang dapat diakses dengan mudah. Apalagi destinasi wisata khusus, seperti garis pantai, gunung, sungai, dan danau rentan terancam bahaya dan risiko untuk terjadinya dan terdampak bencana alam. Pelaku wisata di ODTW cenderung memiliki pengetahuan yang minim tentang bencana alam termasuk tindakan dan aksi yang harus dilakukan pada waktu terjadinya bencana. Selain itu pelaku wisata berasal dari multisektor dan minimnya sistem komunikasi dan informasi dalam menghadapi bencana, sehingga sering tidak peduli dan siaga bencana alam [32]. Oleh karena itu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah koordinasi dengan berbagai pihak (*collaborative governance*). *Penta helix stakeholder* atau kegiatan kerjasama oleh lima unsur bidang dalam pembangunan pariwisata dan penanggulangan bencana harus melibatkan unsur pemerintah, non pemerintah, masyarakat, wisatawan dan media secara optimal.

Faktor utama dan kunci dalam pariwisata siaga bencana berbasis *collaborative governance* adalah pengetahuan tentang fenomena alam dan siap siaga mengantisipasi bencana. Kebijakan dan panduan terkait siap siaga untuk mengantisipasi bencana alam, seperti pendidikan publik, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya, termasuk pendanaan, organisasi pengelola, sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas-fasilitas penting untuk kondisi darurat bencana. Rencana untuk merespons keadaan darurat bencana alam terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan pertama dan penyelamatan, agar korban bencana dapat diminimalkan. Sistem peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana, serta kemampuan memobilisasi sumber daya yang tersedia, baik SDM, pendanaan, sarana dan prasarana penting lainnya.

Perlunya pelaku wisata mengembangkan pariwisata siaga bencana berbasis *collaborative governance* agar bisa disosialisasikan, dikomunikasikan dan dilembagakan dengan mudah kepada *stakeholders* terkait, sehingga ODTW mendapatkan manfaat untuk penanganan bencana yang efektif. Pelaku wisata merupakan subjek sekaligus objek dari peduli dan siap siaga bencana yang berhubungan secara langsung dengan risiko bencana. Pemerintah berperan dan bertanggung jawab terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait bencana alam, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana publik untuk keadaan darurat. LSM berperan sebagai *agent of change*. sumber pengetahuan dan penyebarluasan pengetahuan pada masyarakat dan wisatawan [20] [33].

Hasil kajian mengungkapkan bahwa kurangnya kesiapan pelaku wisata dalam mengantisipasi bencana. Perlunya meningkatkan kesiapsiagaan pelaku wisata agar dapat mengurangi jumlah korban bencana. Untuk mengembangkan pariwisata siaga bencana berbasis *collaborative governance*, analisiskebutuhan oleh pelaku wisata agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan baik dari jenis ataupun jumlahnya, Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari koordinasi dan keterpaduan baik antar lembaga terkait maupun program agar dalam satu komando, penguatan mekanisme kepada lembaga-lembaga penanggulangan bencana melalui pendidikan dan latihan di bidang kebencanaan (Tagana), serta pemberdayaan kepada pelaku wisata tentang siaga bencana yang mungkin terjadi setiap waktu, sehingga risiko bencana dapat diminimalisir [34].

Pada tingkat desa, kecamatan di ODTW perlu dibentuk tim pariwisata siaga bencana. Menjalin kerjasama dengan semua pihak yang terkait seperti aparat desa atau kecamatan, LSM, kepolisian, Puskesmas, PMI, Tim SAR, ORARI, RAPI, lembaga donasi, dan relawan. Penyuluhan berupa sosialisasi kepada pelaku wisata tentang risiko bencana, demonstrasi dan simulasi siaga bencana untuk meningkatkan kesadaran dan menjadi berdaya dalam menghadapi risiko bencana [35] [36]. Pemasangan sistem peringatan bahaya, strategi informasi dan komunikasi darurat bencana. Pembuatan jalur evakuasi dan rambu-rambu peringatan. Melakukan persiapan tindakan darurat, seperti penyelamatan penduduk dengan mengevakuasi ke tempat yang lebih aman dan ketersediaan bahan (logistik), penyiapan tempat pengungsian untuk melindungi jiwa dan harta benda serta mengurangi dampak risiko bencana [28] [37].

Refleksivitas pelaku wisata sebagai masyarakat berisiko berupa tindakan pasif dan aktif. Tindakan pasif bertujuan untuk mengurangi/menghindari akibat bencana, seperti pembuatan peta zonasi wilayah yang rawan bencana, perencanaan aturan bangunan, tata ruang, tata guna lahan, dan lain-lain. Reflektivitas pasif dapat terlaksana dengan melakukan tindakan aktif yang melibatkan pelaku wisata, seperti edukasi terhadap masyarakat dan birokrasi mengenai bencana, infrastruktur yang sesuai aturan, relokasi penduduk, diversifikasi kegiatan ekonomi, penyesuaian tataguna lahan. Pengembangan pariwisata siaga bencana berbasis *collaborative governance* sebagai bentuk upaya pelembagaan penanggulangan bencana di ODTW yang oleh pelaku wisata dalam rangka menumbuhkan sikap siap siaga dan peduli bencana [33].

Dengan dibentuknya unit khusus pariwisata siaga bencana di setiap ODTW, maka dapat mengorganisir potensi pelaku wisata terlatih siaga bencana, menjamin kesinambungan proses siap siaga bencana, meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi sosial dari pelaku wisata, agar mampu mengendalikan potensi wisata, wilayah, dan sumber daya manusia dalam menanggulangi dan mengurangi dampak bencana. Pelaku wisata baik pemerintah (Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Daerah, Tagana, Palang Merah Indonesia, aparat keamanan, dan lain-lain); non pemerintah (LSM, swasta, dunia usaha, lembaga donor dan relawan), serta masyarakat di sekitar ODTW dan wisatawan bekerja sesuai tugas dan perannya masing-masing. Pemerintah bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pembinaan dan pemantapan pariwisata siaga bencana berbasis *collaborative governance* termasuk pos/gardu sosial, dan lapangan untuk lokasi simulasi pariwisata siaga bencana. Bersama pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat sesuai kompetensinya masing-masing mempunyai kompetensi masing-masing melakukan siaga bencana secara komprehensif dan terintegrasi. Perspektif *collaborative*

governance menjadi sangat penting, ketika semua bisa menjalankan peranannya masing – masing, serta dapat menciptakan kolaborasi dengan baik, sehingga tujuan dari pengembangan pariwisata siaga bencana akan benar – benar terwujud dengan baik.

5. Kesimpulan

Pariwisata siaga bencana di ODTW dapat berkembang bila pelaku wisata sebagai masyarakat berisiko mempunyai pengetahuan tentang variasi bencana dan antisipasinya; kebijakan dan panduan siaga bencana; respons dan tanggap darurat; sistem komunikasi informasi dan peringatan bencana, serta mampu memobilisasi sumber daya dan potensi wisata yang ada untuk penanggulangan bencana alam. Pembentukan tim pariwisata siaga bencana, penyuluhan kepada pelaku pariwisata, penyediaan sistem komunikasi dan informasi bencana, pemasangan rambu-rambu peringatan dan jalur evakuasi, tindakan tanggap darurat termasuk pasca bencana dengan berbasis *collaborative governance* merupakan reflektivitas pelaku wisata sebagai masyarakat berisiko bencana untuk menanggulangi bencana.

Referensi

- [1] Katili, John Ario. (1975). “*Volcanism and plate tectonics in the Indonesian island arcs*”. *Tectonophysics*, **26 (3-4)**, 165–188.
- [2] Nefilinda. (2017). “*Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Sikur Kabupaten Padang Pariaman*”. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu 2017.
- [3] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2018). “Hasil Survey dan Pemetaan Lapangan dengan Data Sementara Tanggal 29 Juli - 13 Agustus 2018”. Diakses 25 Februari 2019 dari <https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=hasil-survey-dan-pemetaan-lapangan-dengan-data-sementara-tanggal-29-juli-13-agustus-2018&tag=press-release&lang=ID>
- [4] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2019. “*Data dan Informasi Bencana Indonesia*”. Diakses: 25 Februari 2019 dari <http://dibi.bnpb.go.id/dibi/>
- [5] World Travel and Tourism Council (WTTC). “*WTTC Data Gateway : Visitor Exports (Foreign spending)*”. Diakses: 25 Februari 2019 dari <https://tool.wttc.org/>
- [6] Kompas.com. (2018). “*Membangun Citra Pariwisata Indonesia di Tengah Bencana*”. Diakses: 25 Februari 2019 dari <https://travel.kompas.com/read/2018/08/08/141800527/membangun-citra-pariwisata-indonesia-di-tengah-bencana>.
- [7] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2019. “*Rentannya Pariwisata dari Bencana*”. Diakses: 25 Februari 2019 dari <https://www.bnpb.go.id/rentannya-pariwisata-dari-bencana>
- [8] Rusmiyati, Chatarina . (2012). “Penanganan Dampak Sosial Psikologis Korban Bencana Merapi”. *Informasi*, **17 (02)**: 97-110.
- [9] Rinaldi. (2009). “Kesiapan Menghadapi Bencana Pada Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Penelitian Psikologi* **14(1)**.
- [10] Handayani , Riny. (2011) . “Analisis Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana di Kabupaten Serang Provinsi Banten”. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta*; 207-214.
- [11] Umar, Nurlailah. (2013). “Pengetahuan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir di Bolapapu Kecamatan Kulawi Sigi Sulawesi Tengah”. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, **8 (3)**;184-192.
- [12] Ismayanti, Nurdiansah; R Teguh Satriawan; Roni Khoiron, dan Yani Adriani. (2014). “Pariwisata dan Isu Kontemporer”. Jakarta: Jejakwisata.com.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- [14] International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). (2005). “*Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters*”. *World Conference on Disaster Reduction 18-22 January 2005, Kobe, Hyogo, Japan*.
- [15] Faulkner, Bill. (2001). “Towards a *Framework for Tourism Disaster Management*”. *Tourism Management* **22 (2)**:135–147.
- [16] International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). (2003). “*Rationale Paper on the Framework for Guidance and Monitoring of Disaster Risk Reduction*”. Geneva : Inter-Agency Task Force on Disaster Reduction.
- [17] Sutton, Jeannette; and Kathleen Tierney. (2006). “Disaster Preparedness: Concepts, Guidance, and Research”. *Report prepared for the Fritz Institute Assessing Disaster Preparedness Conference Sebastopol, California, November 3 and 4, 2006*.
- [18] Laws, Eric; Bruce Prideaux, and Kaye. S. Chon (ed). (2007). “*Crisis Management in Tourism*”. Cambridge, USA : CABI.
- [19] York Richard; Eugene A. Rosa; and N Thomas Dietz. (2003). “Footprints on the Earth: The Environmental Consequences of Modernity”. *American Sociological Review* **68 (2)** : 279-300.
- [20] Beck, Ulrich. (1992). “*Risk Society: Towards a New Modernity*”. London: Sage Publication.
- [21] Inglehart, Ronald. (2001). “Modernization, Sociological Theories of”. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, edited by Neil J. Smelser and Paul B. Baltes. Elsevier Ltd, 9965-9971.
- [22] Furedi, Frank. (2007). “The changing meaning of disaster”. *Area* **39(4)**,482-489.
- [23] Hidayati, Deny. (2005). “*Panduan Merintis Siaga Bencana Berbasis Masyarakat*”. Jakarta: LIPI Bagian Pendidikan Kelautan Coremap.
- [24] Abdulah, Irwan. (2008). “*Konstruksi dan Reproduksi Sosial atas Bencana Alam*”. Yogyakarta : Sekolah Pascasarjana UGM.
- [25] Indonesian Institute of Sciences (LIPI)-UNESCO/ISDR. (2006). “*Framework Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami*”. Jakarta: Indonesian Institute of Sciences (LIPI)-UNESCO/ISDR.
- [26] Miller, DeMond S., and Jason David Rivera. (2016). “*Community Disaster Recovery and Resiliency: Exploring Global Opportunities and Challenges*”. Florida, USA : CRC Press.
- [27] O'Flynn, Janine L. and John Wanna. (2008). “*Collaborative governance : A New Era of Public Policy in Australia*”. Australia and New Zealand School of Government Series.

- [28] Hidayati, Deny. (2008). “Kesiapsiagaan Masyarakat : Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia”. *Jurnal Kependudukan Indonesia* **3** (1); 70-84.
- [29] Palang Merah Indonesia (PMI). (2005). “*Konsep, Strategy dan Pendekatan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana: Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana*”. Jakarta: PMI.
- [30] Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches 4th Edition*. London: Sage Publication Inc.
- [31] Ratman, Dadang Rizki. (2016). “Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016 – 2019”. Disampaikan pada *Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata “Akselerasi Pembangunan Kepariwisata Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016*”. Jakarta 27 Januari 2016
- [32] Faulkner, Bill; and Svetlana Vikulov. (2001). Katherine, washed out one day, back on track the next: a post-mortem of a tourism disaster. *Tourism Management* **22** (4) : 331-344.
- [33] Victoria, Lorna P. (2003). “Community based disaster management in the Philippines: making a difference in people's life”. *Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)*, 9.
- [34] Kafle, Shesh Kanta. (2010). Integrated community based risk reduction: an approach to building disaster resilient communities. *Annual International Workshop & Expo on Sumatra Tsunami Disaster & Recovery*. 1-20
- [35] Suhardjo, Dradjat. (2011). “Arti Penting Pendidikan Mitigasi Bencana Dalam Mengurangi Risiko Bencana”. *Cakrawala Pendidikan*, **XXX** (2): 174-188.
- [36] Steward, Duane., and Thomas T. H. Wan. (2007). “The Role of Simulation and Modeling in Disaster Management”. *Journal of Medical Systems*. **3**,125–130.
- [37] Daliyo, Suko. Bandiono, Zainal. Fatoni, dan Brilliant. Nugraha. (2008). “*Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Alam di Kabupaten Sikka*”. Jakarta: LIPI.